



PENGARUH *FLYPAPER EFFECT* PADA DANA KEISTIMEWAAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN

Winaya Miranda Eka Puteri¹, Maunty Isnaeny², Fadjar Tri Sakti³

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email: nayaamrd@gmail.com

ABSTRACT

Since the reforms to Indonesia's governance system, significant changes have occurred in government administration, including the granting of authority to regions to manage their own affairs. This has fostered a spirit of development and facilitated regional governance systems provided by the central government. This study examines how the Special Autonomy Fund (Danais) and Regional Own-Source Revenue (PAD) contribute to the dynamics of economic growth in the Special Region of Yogyakarta (DIY) during the period 2021–2024, using a quantitative descriptive–causality approach. The findings indicate that although Danais, PAD, and GRDP all show year-to-year increases, their patterns of change do not demonstrate a direct relationship that explains the influence of Danais or PAD on economic growth. A flypaper effect may occur when regional economic activity is more strongly influenced by central government transfers than by the region's own revenue capacity. Further investigation is needed to understand how reliance on Danais shapes spending priorities and economic development in DIY.

Keywords: Economic Growth; Special Autonomy Fund; Own Source Revenue

ABSTRAK

Semenjak adanya reformasi pada sistem pemerintahan di Indonesia telah terjadi perubahan yang cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintah, yakni adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini menimbulkan semangat untuk membangun dan memudahkan daerah mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Penelitian ini mengkaji bagaimana Dana Keistimewaan (Danais) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan dalam dinamika pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama 2021–2024 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif kausalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Danais, PAD, dan PDRB sama-sama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pola perubahan tersebut tidak memperlihatkan keterkaitan langsung yang dapat menjelaskan pengaruh Danais maupun PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. *Flypaper effect* mungkin saja dapat terjadi ketika aktivitas ekonomi daerah lebih dipengaruhi oleh dana transfer pusat dibanding kemampuan pendapatan daerah. Kajian yang lebih mendalam masih dibutuhkan untuk memahami bagaimana ketergantungan terhadap Danais membentuk arah kebijakan belanja dan pembangunan ekonomi DIY.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi; Dana Istimewa; Pendapatan Asli Daerah

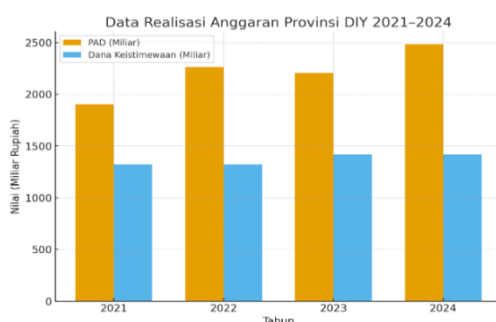
PENDAHULUAN

Sejak era reformasi, sistem pemerintahan di Indonesia yang pada awalnya sentralistik memicu tuntutan desentralisasi kewenangan menjadi desentralistik karena dianggap tidak mampu membawa kesejahteraan yang merata dalam pelaksanaan pembangunan. Perubahan tersebut mendorong munculnya tuntutan agar Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini tercermin melalui kebijakan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah (Rosaeni, 2024). Dengan demikian, setiap Pemerintah Daerah kini memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola sendiri pemerintah dan kebutuhan rakyatnya, termasuk menyusun anggaran belanja daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 yang diperbaharui menjadi UU No. 23 Tahun 2014.

Seiring pelaksanaan otonomi daerah, beberapa daerah di Indonesia saat ini sedang melewati pertumbuhan yang cukup pesat. Namun, pendekatan pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi makro seringkali menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan fiskal antar wilayah. Dimana, investasi cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah lain mengalami pengurangan sumber daya. Sehingga dalam kerangka desentralisasi, sistem pemerintahan Indonesia menerapkan *desentralisasi asimetris*, yaitu pemberian kewenangan khusus kepada daerah berdasarkan kondisi sejarah, budaya, dan politik (Budimantoro & Supriyanto, 2024). Kebijakan ini diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 18B ayat 1 dan 2, dengan tujuan mengakomodasi kebutuhan daerah tertentu secara lebih fleksibel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks desentralisasi asimetris, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang diakui memiliki status istimewa. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, bahwa Negara mengakui dan menghormati status istimewa tersebut. Bentuk pengakuan ini berkonsekuensi pada pengalokasian Dana Keistimewaan (Danais) dari Pemerintah Pusat kepada DIY sejak tahun 2013. Dana Keistimewaan merupakan tambahan transfer dana yang khusus dialokasikan untuk membiayai urusan keistimewaan, seperti kebudayaan dan tata ruang, yang berbeda dari Dana Transfer umum (DAU, DAK) (Musfirati & Sugiyanto, 2021). Dana ini dialokasikan untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis budaya, kelembagaan, pertanahan, dan kebudayaan, sekaligus diharapkan memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keistimewaan DIY menjadikannya satu-satunya provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang memperoleh alokasi pendanaan khusus tersebut.

Lebih lanjut, dalam konteks PAD, PAD dianggap ideal sebagai ukuran kemandirian fiskal daerah, namun ketergantungan yang besar pada transfer pusat masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan ketidakefektifan dalam pembiayaan pengeluaran daerah sehingga terjadi *flypaper effect*. Sebetulnya, pemerintah daerah diharapkan dapat mengarahkan sumber dana tersebut ke sektor-sektor yang produktif agar mampu mendorong peningkatan investasi di daerah, yang pada akhirnya berpengaruh pada bertambahnya penerimaan PAD. Untuk mendeteksi apakah dana transfer mendorong pembangunan secara efisien atau justru menciptakan ketergantungan fiskal, teori *Flypaper Effect* digunakan sebagai pendekatan yang menilai apakah belanja atau aktivitas ekonomi daerah lebih merespons transfer pusat dibandingkan PAD.



Gambar 1.

Sumber: Data Realisasi Anggaran Provinsi DIY 2021 2024 (Diolah Peneliti, 2025)

Berdasarkan grafik di atas yang menunjukkan proporsi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Keistimewaan, dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup efisien, namun masih perlu adanya peningkatan. Hal ini terlihat dari kecenderungan bahwa rata-rata proporsi PAD lebih tinggi dibandingkan Dana Keistimewaan pada setiap tahunnya selama periode 2021–2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari dalam daerah untuk membiayai pembangunan, sehingga ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat, dalam hal ini Dana Keistimewaan tidak terlalu dominan. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pengelolaan fiskal tetap diperlukan agar kemampuan PAD semakin besar dan dapat menjadi pendorong utama pembangunan, sehingga kemandirian keuangan daerah dapat terus ditingkatkan.

Penelitian terdahulu oleh (Khoiri, 2015) dengan judul penelitian “*Flypaper Effect* dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Barat” selama periode 2008–2012. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara individual Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah tidak semata-mata didorong oleh dana transfer dari pemerintah pusat, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri. Dengan demikian, fenomena *flypaper effect* tidak ditemukan dalam belanja daerah di Provinsi Jawa Barat, karena PAD terbukti memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam menentukan besaran belanja daerah pada periode selanjutnya.

Meskipun temuan tersebut penting, penelitian sebelumnya masih memiliki dua keterbatasan utama yang dapat menciptakan celah penelitian yang signifikan. Dimana hanya mengukur keberadaan *flypaper effect* dari perspektif Belanja Daerah, dan belum mengkaji dampak akhir dari fenomena fiskal tersebut terhadap indikator makroekonomi yang lebih luas, seperti pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian tersebut tidak membahas konteks daerah dengan struktur fiskal yang unik, seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang menerima alokasi khusus Dana Keistimewaan (Dais). Sehingga penelitian ini berupaya memberikan analisis yang lebih mendalam dan terfokus serta bertujuan untuk mengkaji bagaimana perbandingan antara Dana Keistimewaan (Dais) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2021–2024. Pendekatan yang lebih terarah pada variabel terikat yang berbeda dan memasukkan variabel fiskal khusus diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut, memberikan temuan yang kontekstual, dan memperluas pemahaman terhadap pola hubungan antara sumber pendanaan spesifik dan kinerja ekonomi daerah.

Perumusan masalah yang disusun berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana realisasi Dana Keistimewaan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021–2024?; (2) Apakah Dana Keistimewaan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021–2024?; (3) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021–2024?; (4) Apakah terdapat fenomena *Flypaper Effect* pada Dana Keistimewaan dan Pendapatan Asli Daerah dalam kaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021–2024?.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Mengetahui Realisasi Dana Keistimewaan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021-2024; (2) Menguji secara empiris apakah Dana Keistimewaan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021–2024; (3) Menguji secara empiris apakah Pendapatan Asli

Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021–2024; (4) Menguji secara empiris apakah terdapat fenomena *Flypaper Effect* pada Dana Keistimewaan dan Pendapatan Asli Daerah dalam kaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021–2024.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Konseptual

1. *Flypaper Effect*

Menurut Dahlby & Ferede dalam Velantin (2024). *flypaper effect* adalah fenomena yang terjadi apabila dana transfer atau hibah antar pemerintah mendominasi pengeluaran daerah setempat daripada pendapatan asli daerah tersebut. Maka dari itu, situasi ini akan memiliki dampak yang ditimbulkan, yaitu ketergantungan yang berakibat pada kesejahteraan suatu daerah. Daerah akan menjadi belum cukup mandiri dalam membiayai pembangunan wilayahnya, dan biasanya tidak menjalankan program pembangunan secara optimal yang mengakibatkan kurangnya kesejahteraan daerah di wilayah tersebut.

2. Dana Keistimewaan DIY

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 42 ayat (1), Dana Keistimewaan (Danais) didefinisikan sebagai dana khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat bagi DIY dan bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Dana tersebut dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan program serta kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan istimewa yang dimiliki DIY, antara lain pengaturan mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, pengembangan dan pelestarian kebudayaan, pengelolaan pertanahan, penataan ruang, serta penguatan kelembagaan daerah. Dari sisi penganggaran, Danais termasuk dalam kelompok belanja transfer, yakni dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan yang bersumber dari kemampuan dan potensi ekonomi daerah itu sendiri. PAD mencakup penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan lain yang sah. Keberadaan PAD berperan penting sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, mendorong kemandirian fiskal, serta menekan ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat (Shafwah, 2024).

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dan unit usaha yang beroperasi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Besaran PDRB menggambarkan kapasitas dan potensi ekonomi daerah dalam memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, PDRB menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai performa perekonomian daerah, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun perubahan struktur ekonomi antar sektor. Selain itu, perkembangan PDRB juga sering digunakan sebagai indikator awal untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, karena peningkatan nilai PDRB umumnya mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan peluang pendapatan di suatu wilayah (Kesuma et al., 2024).

Teori

1. Keuangan Publik

Jaelani (2018) dalam bukunya yang berjudul “*Keuangan Publik: Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*” menegaskan bahwa keuangan publik memiliki dua sisi pendekatan, yaitu positif dan normatif. Keuangan publik positif membahas fakta dan kondisi nyata terkait bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dan menggunakan anggarannya. Hal ini mencakup pemahaman tentang sistem perpajakan yang berlaku saat ini, struktur anggaran negara, serta pola penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, pendekatan positif bertujuan menjelaskan dan menggambarkan apa yang sedang dan dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan negara.

Keuangan publik normatif lebih berfokus pada penilaian mengenai bagaimana kebijakan keuangan negara yang seharusnya dilakukan. Pendekatan ini menilai apakah kebijakan perpajakan, pengeluaran, dan pembiayaan pemerintah dapat mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, menjaga stabilitas ekonomi, serta menciptakan pemerataan pendapatan. Fokus utamanya adalah pada perumusan kebijakan fiskal yang ideal, yang sering kali dipengaruhi oleh pandangan ideologis tertentu (Jaelani, 2018)

2. Desentralisasi Fiskal

Dalam kajian desentralisasi fiskal, konsep *fiscal federalism* umumnya dibedakan dalam dua sudut pandang utama, yaitu teori generasi pertama (*First-Generation Theories*) dan teori generasi kedua (*Second-Generation Theories*). Teori generasi pertama menitikberatkan pada alasan fundamental mengapa desentralisasi fiskal perlu diterapkan. Pemikiran ini berangkat dari pandangan Hayek (1945) yang menyatakan bahwa pemerintah

daerah memiliki informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi, kebutuhan, serta preferensi masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat. Dengan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan anggaran ke daerah, proses pengambilan keputusan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan responsif, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa publik. Keunggulan ini dikenal sebagai efisiensi alokasi, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan publik dengan kebutuhan masyarakat setempat secara lebih optimal (Hamidi et al., 2021). Sementara itu, teori generasi kedua yang dikembangkan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972) lebih menekankan pada aspek perilaku dan insentif pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi fiskal. Teori ini memfokuskan perhatian pada pembagian kewenangan penerimaan dan pengeluaran (*revenue and expenditure assignment*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut perspektif ini, keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh pelimpahan kewenangan, tetapi juga oleh bagaimana aturan dan mekanisme fiskal dirancang.

Ketika intervensi pemerintah pusat dalam pembangunan daerah dikurangi, pemerintah daerah memperoleh keleluasaan yang lebih besar untuk mengelola perekonomian wilayahnya. Namun, agar kebijakan daerah tetap sejalan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, teori generasi kedua menekankan pentingnya dua jenis hubungan, yaitu hubungan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan horizontal antar pemerintah daerah. Kedua interaksi tersebut berperan dalam menciptakan keseimbangan, akuntabilitas, dan kompetisi sehat dalam pengelolaan keuangan daerah (Darmawan et al., 2014)

Sejak diberlakukannya pada tahun 2001, desentralisasi fiskal menjadi salah satu langkah penting pemerintah untuk memberi ruang yang lebih besar bagi daerah dalam mengatur urusan keuangannya. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat berupaya meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, termasuk sektor ekonomi kreatif. Selain itu, kebijakan ini dirancang untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah serta meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam menggali, mengelola, dan memaksimalkan sumber pendapatan yang mereka miliki (Christia & Ispriyarso, 2019).

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan karena mencerminkan peningkatan output nasional suatu negara dari waktu ke waktu. Adam Smith (1776) menegaskan bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi pokok, yaitu menjaga keamanan dan pertahanan, menyelenggarakan sistem peradilan, serta menyediakan

barang-barang publik yang tidak mampu disediakan oleh sektor swasta, seperti infrastruktur dan fasilitas umum. Seluruh fungsi tersebut dilaksanakan melalui kebijakan fiskal yang mencerminkan besaran, struktur, dan arah anggaran negara.

Todaro (1977) menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh tiga komponen pokok. Komponen pertama adalah pembentukan modal yang diperoleh melalui investasi pada modal fisik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komponen kedua berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang berdampak pada bertambahnya jumlah tenaga kerja sehingga mendorong kegiatan produksi. Komponen ketiga adalah kemajuan teknologi yang memungkinkan proses produksi menjadi lebih efisien dan produktif. Kombinasi ketiga faktor tersebut menjadi landasan utama dalam meningkatkan kapasitas ekonomi suatu negara secara berkesinambungan.

Di sisi lain, Kuznets (1955–1966) memaknai pertumbuhan ekonomi sebagai proses jangka panjang yang tercermin dari meningkatnya kemampuan suatu negara dalam menghasilkan beragam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peningkatan kemampuan ini berlangsung seiring dengan perkembangan teknologi serta adanya penyesuaian dalam struktur kelembagaan, sistem sosial, dan pola pikir masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi yang terus berkembang. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencerminkan peningkatan output, tetapi juga menunjukkan adanya transformasi struktural dan sosial dalam perekonomian.

Secara umum, teori pertumbuhan ekonomi terbagi ke dalam dua aliran besar. Kelompok pertama adalah teori pertumbuhan klasik yang berkembang dari abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Tokoh-tokoh seperti Adam Smith (1776), David Ricardo (1817), dan W.A. Lewis (1954) menekankan peran mekanisme pasar bebas sebagai faktor utama yang mendorong pertumbuhan. Sementara itu, aliran kedua adalah teori pertumbuhan ekonomi modern yang mulai muncul pada era 1930-an. Pemikiran Keynes (1936), model Solow-Swan (1956), hingga teori pertumbuhan endogen yang diperkenalkan Romer (1986) menyoroti perlunya intervensi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar dan memastikan keberlangsungan proses pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif kausalitas. Ditujukan untuk menguji hubungan antara dua variabel maupun menyatakan adanya pengaruh antara dua variabel tersebut (Hediyanto, 2016). Fokus wilayah yang dijadikan subjek dalam penelitian ini berfokus pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun objek yang dianalisis mencakup dampak munculnya Flypaper Effect

terhadap Dana Keistimewaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta bagaimana kedua variabel tersebut memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Informasi yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, dan digunakan sebagai dasar teori serta acuan dalam pengolahan data. Pengumpulan data dari jurnal dan sumber daring dilakukan melalui berbagai situs terkait, termasuk situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, lalu Badan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi DIY, dan Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. Mencakup laporan Realisasi Dana Keistimewaan dan PAD serta Pertumbuhan Ekonomi.

Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif mencakup penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, serta perhitungan nilai mean, median, mode, maksimum, dan minimum. Kemudian dengan uji hipotesis, mulai dari analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji statistik f, dan uji parsial. Setelah hasilnya didapat, maka data tersebut akan diuraikan dengan bentuk deskripsi.

Hipotesis

H₁: Terdapat pengaruh Dana Keistimewaan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H₂: Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

H₃: Dana keistimewaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi+

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Keistimewaan

DANA KEISTIMEWAAN				
Tahun	2021	2022	2023	2024
Realisasi	1.320	1.320	1.420	1.420

Tabel 1.

Sumber: Badan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi DIY 2025

Tabel 1 menunjukkan realisasi dana keistimewaan yang diterima oleh provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2021-2022, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara konsisten menerima dana keistimewaan sebesar Rp.1.320.000.000.000,-. Pada tahun 2023, Dana Keistimewaan mengalami peningkatan sebesar Rp.100.000.000.000,- menjadi

Rp.1.420.000.000.000,-. Tahun 2024, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima dana yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp.1.420.000.000.000,-.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Tahun	2021	2022	2023	2024
Realisasi	1.900.920	2.263.430	2.205.550	2.481.510

Tabel 2.

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2025

Tabel 2 menyajikan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2021, provinsi ini memperoleh PAD sebesar Rp1.900.920.000.000. Pada tahun berikutnya, PAD meningkat sebesar Rp362.510.000.000 sehingga totalnya pada tahun 2022 mencapai Rp2.263.430.000.000. Namun, pada tahun 2023, PAD mengalami penurunan sebesar Rp57.000.000.000 sehingga total pendapatan menjadi Rp2.205.550.000.000. Kemudian, pada tahun 2024, PAD kembali meningkat sebesar Rp275.950.000.000, menjadikannya nilai tertinggi dalam tiga tahun terakhir, dengan total penerimaan mencapai Rp2.481.510.000.000.

Pertumbuhan Ekonomi

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)				
Tahun	2021	2022	2023	2024
Realisasi	107.373	112.901	118.626	124.590

Tabel 3.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DIY 2025

Tabel 3 menunjukkan data terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. PDRB ini secara signifikan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, PDRB Provinsi DIY berada di angka Rp.107.373.000.000.000,-. Pada tahun selanjutnya, PDRB mengalami peningkatan sebesar Rp.5.528.000.000.000,- sehingga total PDRB Provinsi DIY tahun 2022 mencapai Rp.112.901.000.000.000,-. Tahun 2023, PDRB Provinsi DIY kembali meningkat sebesar Rp.5.725.000.000.000,- dengan total mencapai Rp.118.626.000.000.000,-. Tahun

2024, PDRB Provinsi DIY meningkat sebesar Rp.5.964.000.000.000,- sehingga totalnya berada di angka Rp.124.590.000.000.000,-.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Keistimewaan	4	1320000	1420000	1370000.00	57735.027
PAD	4	1900920	2481510	2212852.50	239506.539
PDRB	4	107373	124590	115872.50	7408.281
Valid N (listwise)	4				

Tabel 4.

Sumber: Statistik Deskriptif (IBM SPSS 26, 2025)

Berdasarkan **Tabel 4**, terlihat bahwa nilai Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada kisaran Rp1.320.000.000.000 sebagai jumlah terendah dan Rp1.420.000.000.000 sebagai jumlah tertinggi. Selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi tersebut memiliki nilai terendah sebesar Rp1.900.920.000.000 dan nilai tertinggi mencapai Rp2.481.510.000.000. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan jumlah terendah sebesar Rp107.373.000.000.000 dan jumlah tertinggi sebesar Rp124.590.000.000.000.

Hasil Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-17230.929	14177.567		-1.215	.438
	Dana Keistimewaan	.069	.013	.536	5.405	.116
	PAD	.018	.003	.568	5.734	.110

a. Dependent Variable: PDRB

Tabel 5.

Sumber: Hasil Analisis Regresi Linear Berganda (IBM SPSS 26, 2025)

Tabel 5 berisi Persamaan yang dihasilkan dari Analisis Linier Berganda pada **Tabel 5** dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

- 1. Nilai Konstanta (α) = -17230.929** Nilai yang dihasilkan pada konstanta (α) yaitu sebesar -17230.929, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila Dana Keistimewaan

dan Pendapatan Asli Daerah dalam kondisi konstan, maka Pertumbuhan Ekonomi akan sebesar -17230.929 pula.

2. Nilai $b_1 = 0,069$

Nilai b_1 yang dihasilkan yaitu bernilai 0,069 dengan tanda koefisien yang positif menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara Dana Keistimewaan dan Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian, apabila Dana Keistimewaan meningkat sebesar 1 rupiah, maka Pertumbuhan Ekonomi akan bertambah sebesar 0,069 rupiah, dengan asumsi bahwa variabel PAD berada dalam kondisi konstan.

3. Nilai $b_2 = 0,018$

Nilai b_2 yang dihasilkan yaitu bernilai 0,018 dengan tanda koefisien yang positif mengindikasikan adanya hubungan searah antara PAD dan Pertumbuhan Ekonomi. Oleh karena itu, jika PAD meningkat sebesar 1 rupiah, maka Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar 0,018 rupiah, dengan asumsi variabel Dana Keistimewaan tetap konstan.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.997 ^a	.994	.982	987.883

a. Predictors: (Constant), PAD, Dana Keistimewaan

Tabel 6.

Sumber: Hasil Koefisien Determinasi (IBM SPSS 26, 2025)

Tabel 6, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,994 atau 99,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Keistimewaan dan PAD mampu menjelaskan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 99,4%, sementara sisanya, yaitu 0,6%, dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain di luar model regresi linear.

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	163671967.3	2	81835983.67	83.856	.077 ^b
	Residual	975913.658	1	975913.658		
	Total	164647881.0	3			

a. Dependent Variable: PDRB

b. Predictors: (Constant), PAD, Dana Keistimewaan

Tabel 7.

Sumber: Hasil Uji Signifikansi Simultan (IBM SPSS 26, 2025)

Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Diperoleh tabel ANOVA dengan nilai uji f sebesar 83.856 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.077. Oleh karena nilai sig sebesar $0 > 0.05$, maka sudah cukup bukti menyatakan H3 bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara Dana Keistimewaan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

d. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-17230.929	14177.567		-1.215	.438
	Dana Keistimewaan	.069	.013	.536	5.405	.116
	PAD	.018	.003	.568	5.734	.110

a. Dependent Variable: PDRB

Tabel 8.

Hasil Uji Parsial (IBM SPSS 26, 2025)

Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Diperoleh nilai sig pada variabel Dana Keistimewaan sebesar 0.116 dan nilai sig pada variabel PAD sebesar 0.110. Karena nilai sig keduanya $> 0.05 = \alpha$ maka belum cukup bukti menyatakan H1 bahwa Dana Keistimewaan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan H2 bahwa PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

KESIMPULAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima Dana Keistimewaan sebesar Rp1,32 triliun pada tahun 2021 dan 2022, kemudian meningkat menjadi Rp1,42 triliun pada tahun 2023 dan tetap berada pada nilai yang sama di tahun 2024. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan fluktuasi, meningkat dari Rp1,90 triliun pada 2021 menjadi

Rp2,26 triliun pada 2022, kemudian sedikit menurun di 2023 menjadi Rp2,20 triliun, sebelum akhirnya mencapai angka tertinggi dalam empat tahun terakhir pada 2024 yaitu Rp2,48 triliun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 DIY terus menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahun. Nilainya naik dari Rp107,37 triliun pada 2021 menjadi Rp112,90 triliun pada 2022, kemudian meningkat lagi menjadi Rp118,63 triliun pada 2023, dan mencapai Rp124,59 triliun pada 2024. Pertumbuhan berkelanjutan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan kinerja pembangunan di DIY.

Dari data tahun 2021–2024, Dana Keistimewaan, PAD, dan PDRB memang sama-sama meningkat, tetapi pola kenaikannya tidak menunjukkan hubungan yang jelas satu sama lain. Oleh karena itu, belum ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Dana Keistimewaan benar-benar memengaruhi pertumbuhan ekonomi DIY (H1) maupun bahwa PAD berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (H2) pada tahun 2021-2024. Selain itu, dari hasil pengolahan data, menunjukkan bahwa nilai *Standardized Coefficients* Dana Keistimewaan lebih rendah dari nilai *Standardized Coefficients* Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti bahwa baik Dana Keistimewaan maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial maupun simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta selama periode 2021–2024 (H3). Dengan demikian, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menetapkan kebijakan belanjanya bergantung pada jumlah PAD dibandingkan Dana Keistimewaan.

Dana Keistimewaan DIY jumlahnya relatif stabil dan bahkan meningkat (Rp1,32 triliun menjadi Rp1,42 triliun) berpotensi menimbulkan flypaper effect apabila peningkatan PDRB lebih banyak dipicu oleh belanja yang bersumber dari dana transfer tersebut, bukan dari kemampuan pendapatan daerah. PAD DIY juga meningkat tetapi tidak secara langsung terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menguatkan indikasi bahwa pergerakan ekonomi lebih responsif terhadap dana transfer (Dana Keistimewaan) dibanding terhadap pendapatan daerah sendiri. Dengan demikian, terdapat sinyal bahwa flypaper effect mungkin terjadi, meskipun perlu analisis lanjutan untuk memastikan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap dana transfer memengaruhi struktur belanjanya.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mengambil langkah strategis dalam pengelolaan Dana Keistimewaan yang besar dan Pendapatan Asli Daerah yang terus meningkat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut agar semakin naik. Dana dapat dialokasikan untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur pariwisata berbasis budaya yang unik, atau memperkuat UMKM dengan teknologi dan

pelatihan, sehingga setiap rupiah dari Dana Keistimewaan memberikan hasil maksimal bagi PDRB.

Pemerintah dapat meningkatkan kemandirian daerah melalui peningkatan PAD dan menggali semua potensi penerimaan yang ada, seperti optimalisasi pajak atau retribusi, agar daerah tidak terlalu bergantung pada Dana Keistimewaan. Dengan meningkatnya PAD dan dapat dipastikan bahwa Dana Keistimewaan digunakan untuk program-program yang sangat produktif, fenomena *flypaper effect* dapat dihindari, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan lebih terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimantoro, C., & Supriyanto. (2024). DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KONTRIBUSINYA UNTUK MASYARAKAT. *Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 9(3).
- Christia, A.M, & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA.
- Dahlby & Ferede. (2016). The stimulative effects of intergovernmental grants and the marginal cost of public funds. *International Tax and Public Finance*, 23, 144–139.
- Darmawan, A., Keuangan, K., & Indonesia, R. (2014). *Politik Hukum Penguatan Desentralisasi Fiskal dalam Meningkatkan... Agus Darmawan POLITIK HUKUM PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH.*
- Hamidi, U. S., Puspita, D., Penulis Badan, T., Fiskal, K., Keuangan, K., Pahlevi, M., Raharja, M., Hadi, S., Latief Baroto, A., Permana, A. W., & Rahayu, W. T. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Editor.*
- Hediyanto, L. (2016). FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KOTA BANDUNG PERIODE 2008-2012. *E-Proceeding of Management*, 1(3).
- Jaelani, A. (2018). *Keuangan Publik*. Aksara Satu.
- Kesuma, A. R., Rinanda, F. A., Astafira, I., Afriani, N., Fadlirhohim, R. D., Lestari, T. S. A., & Sifriyani, S. (2024). Pemodelan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia Periode 2018-2021 dengan Analisis Regresi Data Panel. *ESTIMASI: Journal of Statistics and Its Application*, 216–229. <https://doi.org/10.20956/ejsa.v5i2.27522>
- Khoiri, R. H. Al. (2015). FLYPAPER EFFECT DAN BELANJA DAERAH DI PROPINSI JAWA BARAT. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2).

- Musfirati, A., & Sugiyanto, H. (2021). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN DANA KEISTIMEWAAN TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal PKN STAN*, 5(1).
- Rosaeni, I. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2010-2022). *Jurnal Buana Ilmu*, 8(2).
- Shafwah, M. A. M. (2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. *Jurnal Bisnis Net*, 7, 282–289.
- Velantina, A. (2024). FLYPAPER EFFECT PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN TERHADAP BELANJA DAERAH DI INDONESIA PADA MASA COVID-19. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 13(2), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>